

Analysis Of The Influence Of Average Years Of Schooling, Open Unemployment, Poor Population, And Per Capita Grdp On Crime Rates In Java Island In 2018-2023

Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pengangguran Terbuka, Penduduk Miskin, Dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kejahatan Di Pulau Jawa Tahun 2018-2023

Putri Ghina Syahla'a¹, Siti Fatimah Nurhayati^{2*}

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia^{1,2}

b300220030@student.ums.ac.id¹, sfn197@ums.ac.id^{2*}

* Corresponding Author

ABSTRACT

Criminal behavior reflects actions that contradict human values and violate existing legal regulations. The presence of crime affects the sense of public security, disrupts social and political stability, and hampers economic growth. This study aims to examine the relationship between average years of schooling, open unemployment rate, the number of poor residents, and gross regional domestic product (GRDP) per capita on crime rates in Java Island during the period 2018–2023. The study utilizes secondary data and applies a quantitative approach through panel data regression analysis, combining the time dimension (2018–2023) and six provinces in Java Island as the cross-sectional dimension. Chow and Hausman tests indicate that the fixed effect model (FEM) is the most appropriate model. The empirical findings reveal that the open unemployment rate and the number of poor residents have a negative effect on crime rates, while GRDP per capita has a positive effect. Meanwhile, the average years of schooling do not show a significant influence. Simultaneous testing confirms that all independent variables collectively affect crime rates in Java Island.

Keywords: crime, average length of schooling, open unemployment rate, number of poor people, and GRDP per capita.

ABSTRAK

Perilaku kriminal mencerminkan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan kejahatan berdampak pada menurunnya rasa aman masyarakat, terganggunya stabilitas sosial-politik, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterkaitan antara rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, serta produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita terhadap tingkat kriminalitas di Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Penelitian memanfaatkan data sekunder dan menerapkan metode kuantitatif melalui analisis regresi data panel yang menggabungkan dimensi waktu (2018–2023) dan wilayah enam provinsi di Pulau Jawa. Hasil pengujian Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model efek tetap (fixed effect model) merupakan model yang paling sesuai. Temuan empiris mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan, sementara PDRB per kapita berpengaruh positif. Di sisi lain, variabel rata-rata lama sekolah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan uji simultan, seluruh variabel independen secara bersama-sama terbukti memengaruhi tingkat kejahatan di Pulau Jawa.

Kata kunci: kejahatan, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan PDRB per kapita.

1. Pendahuluan

Perilaku kriminal dapat dipahami sebagai tindakan menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan kejahatan tidak hanya memunculkan rasa tidak aman di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik, sekaligus menghambat proses pembangunan ekonomi (Purba & Taun, 2023). Dalam perspektif ekonomi kejahatan, Becker (1968) memandang tindakan kriminal sebagai hasil dari pertimbangan rasional individu, di mana pelaku menimbang keuntungan yang diperoleh dengan risiko atau biaya yang harus ditanggung. Ketika ekspektasi

manfaat dinilai lebih besar daripada risiko, kecenderungan untuk melakukan kejahatan akan meningkat. Kondisi sosial ekonomi, seperti keterbatasan akses pendidikan, tingginya tingkat pengangguran, dan tekanan ekonomi akibat kemiskinan, turut memperbesar peluang terjadinya perilaku kriminal.

Kriminalitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Pulau Jawa, yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional sekaligus wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, memiliki kontribusi signifikan terhadap dinamika tingkat kejahatan. Arus urbanisasi yang tinggi, kepadatan penduduk yang semakin meningkat, serta ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah merupakan faktor-faktor yang berpotensi memperbesar risiko terjadinya tindak kriminal di Pulau Jawa (Polri, 2023).

Tabel 1. Jumlah Kejahatan Tertinggi di Pulau Jawa Tahun 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
DKI Jakarta	29.103	32.534	87.426
Jawa Barat	7.502	29.485	45.694
Jawa Tengah	8.909	30.060	42.304
DI Yogyakarta	4.774	10.591	12.061
Jawa Timur	19.257	51.905	66.741
Banten	3.434	5.038	7.392

Sumber: BPS Indonesia, berbagai terbitan

Berdasarkan informasi yang disajikan pada Tabel 1, jumlah tindak kejahatan di wilayah Pulau Jawa menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Data tahun 2021 mencatat bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) menempati posisi dengan jumlah kasus kriminal tertinggi di Pulau Jawa, dan angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023. Di bawahnya, Provinsi Jawa Timur berada pada urutan kedua dengan tren peningkatan kasus yang serupa sampai tahun 2023. Sebaliknya, tingkat kriminalitas terendah di Pulau Jawa tercatat berada di Provinsi Banten.

Tingginya tingkat kejahatan di suatu daerah tidak terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan, serta laju pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pendidikan yang berpengaruh terhadap perilaku kriminal adalah rata-rata lama sekolah. Wilayah dengan capaian pendidikan yang relatif tinggi umumnya menunjukkan tingkat kriminalitas yang lebih rendah. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan dapat mempersempit kesempatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, sehingga berpotensi mendorong munculnya perilaku menyimpang, termasuk tindakan kriminal (Amilia & Ridwan, 2024). Namun demikian, Rahmalia et al. (2019) menegaskan bahwa indikator rata-rata lama sekolah lebih mencerminkan aspek kuantitatif pendidikan, tanpa memperhitungkan mutu pembelajaran maupun kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga peningkatan lama sekolah belum tentu berbanding lurus dengan penurunan angka kejahatan.

Selain pendidikan, kemiskinan juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya angka kriminalitas. Kondisi kemiskinan sering kali berkaitan dengan keterbatasan akses ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang pada situasi tertentu dapat mendorong individu untuk melanggar hukum sebagai strategi bertahan hidup. Jumlah penduduk miskin yang tinggi berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan tekanan sosial, serta meningkatkan risiko terjadinya kejahatan (Sugiharti et al., 2021). Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi umumnya juga ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap kriminalitas, karena ketiadaan pekerjaan dapat memicu tekanan ekonomi dan meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal di Pulau Jawa. Individu yang tidak

memiliki sumber penghasilan cenderung menghadapi ketidakstabilan ekonomi, yang dalam kondisi tertentu dapat mendorong terjadinya tindak kejahatan (Susanti et al., 2025).

Selanjutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Tingkat kemakmuran yang tercermin dari PDRB per kapita diyakini memiliki pengaruh terhadap berbagai faktor sosial-ekonomi yang berkaitan dengan tindak kriminal (Schleimer et al., 2022). Daerah dengan PDRB per kapita yang tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih sejahtera, sehingga kemungkinan terjadinya kriminalitas menjadi lebih rendah. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan pendapatan, kesenjangan sosial dapat meningkat dan memicu meningkatnya tindak kejahatan (Atthorik et al., 2024).

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap tingkat kriminalitas. Beberapa studi menyebutkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah dapat menurunkan angka kejahatan (Amelia & Ridwan, 2024), sementara penelitian lain menemukan bahwa pendidikan tidak selalu berdampak signifikan terhadap penurunan kriminalitas (Rahmalia et al., 2019). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya dengan fokus pada wilayah Pulau Jawa dalam periode 2018–2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, dan PDRB per kapita terhadap tindak kriminal di Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengendalian kejahatan dari perspektif sosial-ekonomi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Kejahatan

Berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara, sehingga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Sebagai hukum pidana umum, KUHP mengklasifikasikan berbagai perbuatan seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan sebagai tindak kejahatan karena melanggar kepentingan hukum yang dilindungi negara. Dalam konteks yang lebih luas, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan berat yang dilakukan secara sistematis dan berulang melalui serangan yang diarahkan kepada penduduk sipil, sehingga menempatkan kejahatan bukan sekadar pelanggaran hak individu, tetapi juga ancaman serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara serta mengganggu tata kelola pemerintahan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Maulida (2025) menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang oleh negara dikategorikan sebagai tindak pidana, yang dampaknya tidak hanya berupa penyimpangan perilaku, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan publik, serta bersifat dinamis mengikuti perubahan norma sosial dan hukum, sehingga suatu perbuatan dinilai sebagai kejahatan ketika bertentangan dengan nilai sosial sekaligus melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan, yaitu:

1. Rata - rata lama sekolah

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran signifikan dalam menekan tingkat kejahatan. Peningkatan kualitas pendidikan terbukti mampu mengurangi kecenderungan kriminal karena individu yang berpendidikan lebih baik memiliki peluang lebih

besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup secara legal. Rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi berhubungan negatif dan signifikan dengan angka kejahatan, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin rendah potensi keterlibatan dalam tindakan kriminal. Pendidikan tidak hanya membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas serta meningkatkan pemahaman terhadap norma dan ketentuan hukum. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali berkorelasi dengan keterbatasan akses kerja, tekanan ekonomi, dan lemahnya literasi hukum, yang dapat mendorong individu memilih jalur kejahatan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan. Selain itu, pendidikan memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor sosial ekonomi lain dalam menekan kriminalitas, baik melalui peningkatan pendapatan maupun melalui pembentukan nilai moral, empati, dan kesadaran hukum. Pendidikan yang lebih tinggi juga berkontribusi pada stabilitas sosial, tercermin dari tingginya partisipasi kerja, rendahnya tingkat kemiskinan, serta kuatnya pengawasan sosial di suatu wilayah. Lingkungan dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung memiliki masyarakat yang lebih kritis, mampu menyelesaikan tekanan ekonomi dan sosial secara konstruktif, serta lebih patuh terhadap norma hukum. Dengan demikian, pendidikan merupakan variabel strategis yang tidak hanya membentuk kapasitas akademik individu, tetapi juga memengaruhi perilaku sosial dan dinamika kejahatan secara menyeluruh.

2. Pengangguran terbuka

Pengangguran merupakan kondisi ekonomi yang berpotensi memicu meningkatnya tindakan kriminal karena ketiadaan pekerjaan dan pendapatan tetap menimbulkan tekanan finansial yang mendorong individu mencari alternatif pemenuhan kebutuhan secara ilegal, terutama pada wilayah dengan perlindungan sosial yang lemah (Anozi & Novianda, 2023). Meski demikian, temuan empiris menunjukkan hasil yang tidak seragam, sebagaimana Bahtiar dan Nurhayati (2024) yang menemukan bahwa kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur justru diikuti oleh penurunan tingkat kejahatan, yang dipengaruhi oleh melemahnya mobilitas sosial dan aktivitas ekonomi sehingga peluang kejahatan turut berkurang. Di sisi lain, pengangguran juga berdampak pada aspek psikologis, seperti meningkatnya stres, hilangnya rasa harga diri, dan melemahnya ikatan sosial, yang dapat mendorong individu mengambil keputusan menyimpang ketika berada dalam lingkungan yang kurang mendukung (Koli et al., 2025). Kondisi tersebut menjadi lebih signifikan di wilayah perkotaan padat penduduk, di mana tingginya aktivitas masyarakat, kesenjangan sosial, dan banyaknya lokasi rawan kejahatan menciptakan peluang lebih besar bagi individu menganggur untuk terlibat dalam pencurian dan kejahatan jalanan (Putri & Rachmawati, 2023; Kleck & Jackson, 2016). Dengan demikian, pengangguran terbuka dapat dipahami sebagai faktor yang berinteraksi dengan kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan dalam membentuk pola kejahatan, khususnya di kawasan perkotaan dengan intensitas aktivitas yang tinggi.

3. Penduduk miskin

Kemiskinan menggambarkan keterbatasan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, yang pada akhirnya berdampak pada sempitnya akses terhadap pekerjaan dan layanan sosial. Kondisi ekonomi yang lemah tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga memicu tekanan psikologis dan sosial, seperti rasa ketidakadilan, frustrasi, dan keputusasaan, yang berpotensi mendorong perilaku menyimpang atau kriminal (Prihartini et al., 2025; Khairiroh, 2025). Lingkungan dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya ditandai oleh kepadatan penduduk, infrastruktur yang kurang memadai, serta lemahnya kontrol sosial, sehingga membuka peluang lebih besar bagi berkembangnya aktivitas ilegal (Ruslan et al., 2025). Temuan Fitriyyah dan Pramana (2025) menunjukkan bahwa wilayah dengan proporsi penduduk miskin yang besar cenderung memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dibandingkan daerah yang

lebih sejahtera, sehingga kemiskinan dapat dipahami sebagai faktor yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap meningkatnya kejahatan, khususnya di kawasan perkotaan.

4. Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita

Sejumlah studi menunjukkan bahwa keterkaitan antara PDRB per kapita dan tingkat kejahatan tidak bersifat tunggal. Maichal et al. (2024) mengungkapkan bahwa tingginya PDRB per kapita belum tentu menekan kejahatan apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung timpang, karena ketimpangan pendapatan dapat memunculkan rasa ketidakadilan sosial yang mendorong perilaku menyimpang. Sebaliknya, temuan Fajri dan Rizki (2019) serta Nurfatmawati dan Nurhayati (2023) menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita cenderung berkorelasi dengan penurunan kejahatan, sedangkan penurunan pendapatan daerah berpotensi meningkatkan kriminalitas. Hasil ini diperkuat oleh Jazila dan Aini (2025) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menekan kejahatan apabila disertai kebijakan yang inklusif, seperti pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga hubungan PDRB dan kejahatan perlu dianalisis secara kontekstual dan komprehensif.

2.3 Dampak Kejahatan

Kejahatan menimbulkan konsekuensi multidimensional yang melampaui kerugian individu dan secara langsung memengaruhi keberlanjutan ekonomi serta kohesi sosial masyarakat. Dari sisi ekonomi, aktivitas kriminal memicu pengeluaran langsung berupa kerusakan aset, hilangnya kepemilikan, biaya perawatan korban, dan pembiayaan aparat penegak hukum, serta menimbulkan beban tidak langsung seperti penurunan produktivitas, melemahnya minat investasi, dan meningkatnya pengeluaran keamanan pada level rumah tangga maupun korporasi (Heeks et al., 2018). Secara sosial, tingginya intensitas kejahatan menggerus rasa aman, menurunkan kualitas hidup, dan memicu kecemasan berkepanjangan, terutama di ruang publik, sementara korban kerap mengalami tekanan psikologis jangka panjang yang berujung pada melemahnya kepercayaan sosial. Fenomena ini tidak terbatas pada konteks Indonesia; di Inggris, kejahatan berkontribusi pada berkurangnya interaksi sosial dan mendorong segregasi permukiman berbasis tingkat keamanan dan kesejahteraan (Christmann & Rogerson, 2004), sedangkan di Brasil, maraknya kekerasan membatasi mobilitas masyarakat, meningkatkan ketergantungan pada keamanan privat, dan memperlebar kesenjangan sosial (Koeller et al., 2020). Oleh karena itu, pengendalian kejahatan menjadi prasyarat penting bagi stabilitas sosial sekaligus percepatan pembangunan ekonomi, yang menuntut keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan (Stiawan & Yusuf, 2025).

2.4 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Upaya pengendalian kejahatan tidak dapat dilepaskan dari peran kebijakan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada perbaikan kondisi kehidupan masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial kerap menjadi faktor pemicu munculnya tindakan kriminal, sehingga intervensi pemerintah melalui perluasan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi strategi yang efektif dalam menekan angka kejahatan secara berkelanjutan (Hung, 2024). Akses pendidikan yang lebih luas meningkatkan kapasitas individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sementara program bantuan dan pemberdayaan ekonomi mampu mereduksi tekanan finansial yang mendorong perilaku menyimpang. Di sisi lain, penegakan hukum berfungsi sebagai respons setelah kejahatan terjadi dengan menitikberatkan pada proses penyelidikan hingga penghukuman, yang efektivitasnya semakin meningkat melalui pemanfaatan teknologi pengawasan di wilayah rawan kejahatan (Negara, 2024). Selain itu, pendekatan preventif diarahkan pada pencegahan sebelum tindak kriminal muncul, baik melalui langkah jangka pendek seperti penerangan

lingkungan, patroli, dan CCTV, maupun melalui strategi jangka panjang yang menekankan perbaikan kualitas pendidikan, ketahanan keluarga, dan partisipasi sosial masyarakat (Susilo, 2023).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel yang menggabungkan dimensi waktu dan wilayah. Data panel disusun dari runtun waktu tahun 2018–2023 serta enam provinsi di Pulau Jawa sebagai unit penampang, sehingga menghasilkan total 36 observasi. Seluruh data bersumber dari data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat kejahatan ditetapkan sebagai variabel terikat, sementara variabel bebas meliputi rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan PDRB per kapita pada enam provinsi di Pulau Jawa selama periode penelitian. Hubungan antarvariabel dianalisis melalui persamaan ekonometrika yang mengacu pada Gujarati dan Porter (2009):

$$CRIME_{it} = \beta_0 + \beta_1 RLS_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 JMISKIN_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

CRIME = Jumlah tindak kejahatan (ribu kasus per tahun)

RLS = Rata-rata lama sekolah (tahun)

TPT = Tingkat pengangguran terbuka (% per tahun)

JMISKIN = Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa per tahun)

PDRB = Produk domestik regional bruto per kapita (ribu rupiah per tahun)

ε_{it} = error untuk unit *cross section* ke-*i* pada periode ke-*t*

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi variabel independen

Tahap estimasi model dalam regresi data panel dilakukan dengan tiga pendekatan regresi data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, serta Uji Hausman untuk menentukan kesesuaian antara FEM dan REM. Setelah model terbaik terpilih, dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan uji *t* untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji *F* untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, serta koefisien determinasi R^2 untuk melihat seberapa besar variasi jumlah kejahatan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) beserta hasil uji pemilihan model dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	-58298,89	-254755,3	-103116,9
<i>RLS</i>	7292,342	35330,22	12694,80
<i>TPT</i>	-2444,904	-2427,671	-3452,687
<i>JMISKIN</i>	8,501242	-27,01321	10,60588
<i>PDRB</i>	0,123644	0,423975	0,103332
R^2	0,579570	0,809804	0,438959
Adjusted. R^2	0,525321	0,743966	0,366567
Statistik F	10,68349	12,30009	6,063619

Prob. Statistik F	0,000015	0,000000	0,001004
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross- Section $F(5,26) = 6,294634$; Prob. $F(5,26) = 0,0006$			
(2) Hausman			
Cross-Section random $\chi^2(4) = 25,390617$; Prob. $\chi^2(4) = 0,0000$			
Sumber: Eviews, diolah kembali.			

4.1 Pemilihan Model Terbaik

1. Uji Chow

Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik F adalah sebesar 0,0006, karena angka tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,01$ sehingga H_0 ditolak. Artinya, model yang terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

2. Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2 adalah sebesar 0,0000, karena angka tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,01$ sehingga H_0 ditolak. Artinya, model yang terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman, *Fixed Effect Model (FEM)* terpilih sebagai model dengan estimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap *FEM* disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Model Estimasi *Fixed Effect Model (FEM)*

$CRIME_{it} = -254755,3 + 35330,22 RLS_{it} - 2427,671 TPT_{it}$
(0,2267) (0,0288)**
$- 27,01321 JMISKIN_{it} + 0,423975 PDRB_{it}$
(0,0030)* (0,0311)**
$R^2 = 0,579570$; $DW = 1,121526$; $F.stat = 10,68349$; Prob. $F = 0,000015$

Sumber: BPS, diolah.

Keterangan:

* Signifikan pada $\alpha = 0,01$

** Signifikan pada $\alpha = 0,05$

*** Signifikan pada $\alpha = 0,10$

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

4.2 Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Hasil uji t pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari empat variabel yang dianalisis dalam model ekonometrik, tiga variabel terbukti berpengaruh terhadap tingkat tindak kejahatan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan jumlah penduduk miskin (JMISKIN) menunjukkan hubungan negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pada kedua variabel tersebut cenderung diikuti oleh penurunan tindak kejahatan, sedangkan penurunannya justru berkorelasi dengan peningkatan kejahatan. Sebaliknya, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita berpengaruh positif, sehingga kenaikan PDRB per kapita sejalan dengan meningkatnya tindak kejahatan, sementara penurunan PDRB per kapita berkaitan dengan menurunnya kejahatan. Adapun rata-rata lama sekolah (RLS) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tindak kejahatan.

4.3 Uji Kebaikan Model

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar 0,0000 berada di bawah tingkat signifikansi 0,01, sehingga hipotesis nol tidak dapat dipertahankan. Temuan ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, serta PDRB per kapita secara kolektif memiliki pengaruh terhadap tingkat kejahatan di

Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Selain itu, besaran koefisien determinasi (R^2) yang mencapai 0,579570 menunjukkan bahwa sekitar 57,95% variasi tingkat kejahatan mampu diterangkan oleh keempat variabel tersebut, sementara sisanya sebesar 42,05% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kerangka model penelitian.

4.4 Nilai Konstanta

Tabel 4. Efek dan Konstanta Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Efek Wilayah	Konstanta
1.	DKI Jakarta	-187877,3	-442632,6
2.	Jawa Barat	78607,75	7606019,7
3.	Jawa Tengah	101743,9	-153011,4
4.	DI Yogyakarta	-70667,32	-325422,62
5.	Jawa Timur	115828,5	370583,8
6.	Banten	-37635,62	-292390, 92

Sumber: Eviews, diolah kembali.

Mengacu pada Tabel 4, Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki nilai konstanta paling tinggi, yaitu sebesar 7.606.019,7, yang menunjukkan bahwa kombinasi variabel rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, serta PDRB per kapita cenderung berkorelasi dengan tingkat tindak kejahatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Posisi berikutnya ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai konstanta terbesar kedua. Sebaliknya, nilai konstanta terendah ditemukan di Provinsi DKI Jakarta sebesar -442.632,6, yang mengindikasikan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tindak kejahatan di wilayah ini relatif paling rendah. Setelah DKI Jakarta, provinsi dengan konstanta rendah secara berurutan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Jawa Tengah.

4.5 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tindak kejahatan yang terjadi di pulau Jawa selama periode 2018-2023 dipengaruhi oleh variabel pengangguran terbuka (*TPT*), jumlah penduduk miskin (*JMISKIN*), dan produk domestik regional bruto (*PDRB*) per kapita. Tingkat pengangguran terbuka (*TPT*) dan jumlah penduduk miskin (*JMISKIN*) memiliki pengaruh negatif terhadap kejahatan. Di sisi lain, produk domestik regional bruto (*PDRB*) per kapita memiliki pengaruh yang positif terhadap kejahatan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (*RLS*) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindak kejahatan yang terjadi di pulau Jawa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, rata-rata lama sekolah (*RLS*) tidak memiliki pengaruh terhadap tindak kejahatan di pulau Jawa. Peningkatan rata-rata lama sekolah tidak memberikan pengaruh terhadap variasi tingkat kejahatan di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan karena indikator rata-rata lama sekolah hanya menggambarkan kuantitas pendidikan tanpa memperhitungkan kualitas pembelajaran dan relevansi keterampilan terhadap dunia kerja, sehingga peningkatan lama sekolah tidak selalu berdampak langsung pada penurunan kriminalitas. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan lama sekolah perlu diimbangi dengan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan ekonomi agar dapat menekan angka kriminalitas secara efektif (Ardefa et al., 2025). Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Rumaisha et al., (2025) menjelaskan bahwa, rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan di Indonesia. Pendidikan formal belum cukup efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan karena perilaku kejahatan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti tekanan ekonomi, kondisi lingkungan sosial, peluang kerja yang terbatas, serta ketidakstabilan sosial yang dihadapi individu. Dengan kata lain, pendidikan yang hanya dilihat dari sisi kuantitas belum cukup untuk mengubah kondisi sosial-ekonomi yang menjadi faktor pendorong utama terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu,

diperlukan peningkatan pada kualitas pembelajaran, penguatan karakter, serta penciptaan peluang ekonomi agar pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kejahatan.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap jumlah kejahatan di pulau Jawa. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka jumlah kejahatan akan cenderung menurun. Penurunan tingkat pengangguran akan menyebabkan peningkatan jumlah kejahatan, hal ini disebabkan oleh lulusan baru dari perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan mungkin lebih cenderung untuk berinovasi dalam bidang lain, dan lebih memilih bekerja di sektor informal atau mencari peluang usaha sendiri. Dengan latar belakang pendidikan yang cukup, mereka lebih cenderung untuk berpikir rasional dan menghindari perilaku yang melanggar hukum (Risma & Dariah, 2024). Namun ada faktor lain, dimana tingginya angka pengangguran dapat disebabkan oleh lulusan baru dari perguruan tinggi yang terlalu selektif dalam mencari pekerjaan, sehingga banyak lulusan yang enggan mengambil pekerjaan karena dianggap tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka (Young et al., 2025).

Hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap tindak kejahatan di pulau Jawa. Kemiskinan tidak selalu berpengaruh signifikan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penduduk miskin sehingga tidak memiliki akses untuk melakukan tindak kejahatan. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak individu miskin yang memilih untuk tidak melakukan tindak kejahatan karena beratnya pertimbangan akan risiko yang harus ditanggung. Mereka memahami bahwa tanpa akses terhadap bantuan hukum yang memadai, konsekuensi yang didapat jika terkena pidana jauh lebih merugikan bagi mereka dibandingkan bagi individu yang lebih kaya. Selain itu, keadaan pendapatan yang rendah membuat mereka lebih berhati-hati karena setiap tindakan kejahatan dapat mengancam kestabilan ekonomi, terutama ketika mereka tidak memiliki cadangan finansial untuk menghadapi proses hukum. Dalam situasi tersebut individu akan lebih berhati-hati karena kesalahan kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, keterbatasan pendapatan, ketiadaan cadangan ekonomi, dan tingginya risiko sosial serta hukum yang harus ditanggung oleh kelompok masyarakat miskin menjadi faktor yang menjelaskan bahwa kemiskinan menunjukkan hubungan negatif terhadap tindak kejahatan (Jamaliah & Elyta, 2022).

Sementara itu, produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap kejahatan di pulau Jawa. Hal ini menjelaskan bahwa, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat memberikan keuntungan dari sisi kesejahteraan masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi juga bisa membawa risiko meningkatnya tindak kejahatan. Artinya, dengan munculnya ketidaksetaraan dalam kesejahteraan kehidupan masyarakat dan distribusi yang tidak merata dapat memicu perasaan kurang puas sehingga mendorong peluang untuk terjadinya kejahatan (Nurhasta, 2024).

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4, diketahui bahwa provinsi Jawa Barat memiliki nilai konstanta tertinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, pengaruh variabel rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kejahatan di Jawa Barat cenderung lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di pulau Jawa. Kondisi ini dapat dijelaskan karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk dan tingkat urbanisasi tertinggi di Indonesia. Kepadatan penduduk dan tingginya aktivitas ekonomi dapat memicu potensi tindak kejahatan akibat kesenjangan sosial dan tekanan ekonomi (Barwanto & Ramadhan, 2024). Setelah Jawa Barat, provinsi Jawa Timur memiliki nilai konstanta yang juga cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh padatnya kegiatan ekonomi dan industri di wilayah perkotaan seperti Surabaya. Daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi yang tidak diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan dapat mengalami peningkatan potensi kejahatan karena ketimpangan pendapatan dan kesempatan kerja (Natalya & Rachmawati, 2024).

Provinsi Banten sebagai provinsi yang memiliki nilai konstanta terendah, menunjukkan tingkat kejahatan yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa.

Kondisi daerah dengan luas wilayah kecil dan tingkat kepadatan yang terkendali memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Selain itu, Banten memiliki kedekatan geografis dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) yang berpengaruh terhadap peningkatan pengawasan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mampu menekan potensi kejahatan (Handayani, 2015). Provinsi lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), dan Jawa Tengah juga memiliki nilai konstanta yang rendah, yang menandakan bahwa tingkat kejahatan di wilayah tersebut relatif lebih stabil dan terkendali. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, struktur ekonomi, serta pemerataan sosial, dan kebijakan keamanan daerah berperan penting dalam terjadinya tindak kejahatan di pulau Jawa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data panel yang menganalisis keterkaitan rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, serta PDRB per kapita terhadap tingkat kejahatan di Pulau Jawa selama periode 2018–2023, diperoleh bahwa fixed effect model (FEM) merupakan model estimasi yang paling sesuai. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap kejahatan, sementara PDRB per kapita justru memberikan pengaruh positif, sedangkan rata-rata lama sekolah tidak terbukti berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berkontribusi terhadap variasi tingkat kejahatan, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,579570 yang mengindikasikan bahwa 57,95% perubahan tingkat kejahatan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Tidak signifikannya pengaruh rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa aspek kuantitas pendidikan belum tentu berdampak langsung pada penurunan kejahatan karena belum mencerminkan kualitas dan relevansi keterampilan yang dimiliki. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pendukung seperti penguatan pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan hidup, serta pembinaan karakter berbasis komunitas. Penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel tambahan seperti inflasi, indeks pembangunan manusia, dan ketimpangan ekonomi, serta memperluas cakupan wilayah dan pendekatan analisis guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Amilia, D., & Ridwan, P. (2024). Analisis tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan, and income inequality in Indonesia. *Social Sciences*, 11(3).
- Anozi, D. T., & Novianda, B. (2023). Socio-economic and property crime rate in Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 88–96. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>
- Ardefa, S. P., Naeruz, M., & Apriandi, A. (2025). Analisis pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap PDRB melalui kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Development*, 12(2), 192–210.
- Atthoriq, W., Septriani, S., & Winarni, E. (2024). Analisis pengaruh ketimpangan pendapatan dengan spatial autocorrelation: Mempersiapkan momentum puncak bonus demografi. *CR Journal (Creative Research for West Java Development)*, 10(1), 1–16. <https://crjournal.jabarprov.go.id>
- Bahtiar, H., & Nurhayati, S. F. (2024). Analysis of the influence of economic factors on crime during the coronavirus pandemic. *Journal of Urban Health*, 99(1), 82–91.
- Barwanto, L. A., & Ramadhan, A. (2024). Identifikasi pola demografi di Provinsi Jawa Barat dan gangguan psikologis dalam struktur masyarakat modern. *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 5(2), 330–338. <https://jurnalp4i.com/index.php/paedagogy>
- Charliesta, C. (2025). Implementasi pendidikan hukum sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan: Analisis kriminologis dan implikasinya terhadap hukum pidana. *Jurnal Restorative*, 1(1), 52–63. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/restorative>
- Christmann, K., & Rogerson, M. (2004). Crime, fear of crime and quality of life: Identifying and

- responding to problems. Northern Crime Consortium. <https://www.gov.uk/government/publications/crime-fear-of-crime-and-quality-of-life>
- Douglas, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Fajri, R. E., & Rizki, C. Z. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan pengangguran terhadap kriminalitas perkotaan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(3), 255–263. <https://jim.unsyiah.ac.id>
- Fitriyyah, N. R., & Pramana, S. (2025). Green spaces and crime: Spatial modeling of socio-economic influences in Jakarta's urban areas. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(1), 116–137.
- G. S. Becker. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Handayani, R. (2015). Analisis dampak kependudukan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 21–36.
- Hayati, N., & Muzdalifah, M. (2023). The effect of education, unemployment, and population on crime in Indonesia. *International Journal of Business and Applied Economics*, 4(4), 1647–1666.
- Heeks, M., Reed, S., Tafsiri, M., & Prince, S. (2018). The economic and social costs of crime. *Community Development Journal*, 5(6), 10783–10790.
- Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Hung, J. (2024). Sociological and policy examination of poverty-led crime in Indonesia: Case study of West Kalimantan. ICOEBS. <https://www.atlantispress.com/article/125992215.pdf>
- Jamaliah, & Elyta. (2022). The effect of human development index (HDI) on poverty and crime. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 12(3), 305–318. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Jazila, H., & Aini, Z. (2025). Kriminalitas di tengah pertumbuhan: Paradoks ekonomi dan kebijakan. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(4), 642–651. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan statistik kriminal nasional 2023. Jakarta: Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
- Khairiroh, N. E. (2025). Kemiskinan di Indonesia: Analisis penyebab, dampak, dan solusi ekonomi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 1693–1706.
- Koli, Y. B., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Krisis peran sosial: Pengangguran dan pengangguran terbuka terhadap PDRB melalui kriminalitas di Indonesia. *Management Science and Economics Journal*, 5(1), 12–22. <https://journal.yrpiiku.com>
- Laqueur, H. S., & Wintemute, G. J. (2022). Unemployment and crime in US cities: A national case-control study of serious property crime. *Journal of Quantitative Criminology*, 32(3), 489–513.
- Maichal, M., Hartono, P. G., Firman, A., & Yudha, I. M. E. K. (2024). The influence of GRDP per capita and foreign direct investment on income inequality. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 8(2), 197–206.
- Maulida, K. (2025). Kriminalitas dan hukum: Perspektif sosiologi terkait kontrol sosial dan moralitas. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 320–328. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1582>
- Natalya, D., & Rachmawati, L. (2024). Pengaruh aglomerasi industri terhadap PDRB di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 54–61.
- Negara, L. G. P. (2024). E-policing dan implikasi kebijakan pengelolaan keamanan publik. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 3(3), 11–25. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- Nurfatmawati, Y. D., & Nurhayati, S. F. (2023). Analisis faktor-faktor ekonomi yang

- mempengaruhi kriminalitas di Jakarta dan Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 109–116.
- Purba, A. N., & Taun, T. (2023). Implikasi Tinjauan Dalam Mengeksplorasi Hubungan Antara
- Putra, P. I. G., Aris, A., & Gusmaneli, G. (2024). Peran Pendidikan dalam Membangun
- Putri, J. A., & Rachmawati, L. (2023). The Influence of Economic Factors on Criminality in
- Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan
- Ramadhan, B., & Sunoto, S. (2025). Analysis of Determinants of Crime in Java and Bali. Rates in East Java Regencies/Cities in 2017–2021.
- Reiner, 2009. <https://doi.org/10.2307/2230043>
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak*
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana*
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang*
- Risma, R., & Dariah, A. R. (2024). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan Pengangguran Terhadap
- Rumaisha, Z., Subanti, S., & Slamet, I. (2025). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
- Ruslan, M. I. M., Rukman, A. A., & Rahman, M. I. (2025). Hubungan antara Kemiskinan dan sarjana dan tantangan pengangguran di Indonesia: Strategi adaptasi di era digital. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2).
- Schleimer, J. P., Pear, V. A., McCort, C. D., Shev, A. B., De Biasi, A., Tomsich, E., Buggs, S., Sosial di Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 9(3), 850–861. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i3.4128>
- Stiawan, B., & Yusuf, H. (2025). Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Study of (child) Prostitution. *Journal of Poverty*.
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Agustin, L., & Rohmawati, H. (2021). Criminality
- Susanti, S. T., Ananta, P., Suparta, I. W., & Murwiati, A. (2025). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(6), 1794–1801. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>
- Susilo, E. (2023). Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di *Syntax Admiration*, 5(12), 5764–5771. <https://journal.syntaxadmiration.id>
- Urban. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 308–312.
- vol. 76, no. 2, pp. 169–217, 1968. <https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch25>
- Young, F., Ashari, A. A., Zahra, D., Simanjuntak, A. C., & Tampubolon, B. R. (2025). Lulusan